



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. APT Pranoto No. 01 Telp (0554) 21008, 21076, 21015 Fax. 21068
TANJUNG REDEB

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR **47** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ASN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL
KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan LHKAN Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan surat Kepala BKPSDM Kabupaten Berau Nomor 800/153/BKPSDM-I/2024 perihal penyampaian data ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau per tanggal 2 Januari 2024 yang disampaikan oleh BKPSDM Kabupaten Berau berjumlah 6.424 orang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 985);
6. Peraturan Bupati Berau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Jumlah Asn Wajib Menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara berupa Bukti Laporan LHKPN dan SPT Tahunan dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Berau;

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak Januari 2024.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, **12 Februari** 2024



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU
 NOMOR **47** TAHUN 2024
 TANGGAL **12 FEBRUARI** 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH ASN WAJIB MENYAMPAIKAN
 LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR NEGARA
 (LHKAN) TAHUN 2024

PENETAPAN JUMLAH ASN WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL
 KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH WAJIB LHKAN	
		PNS	PPPK
1.	Sekretariat Daerah	142	4
2.	Sekretariat Dprd	56	-
3.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41	3
4.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	31	2
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	41	2
6.	Badan Pendapatan Daerah	46	-
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	63	1
8.	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan	38	3
9.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	41	-
10.	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	37	-
11.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	32	2
12.	Dinas Kesehatan	668	417
13.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	35	4
14.	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	57	6
15.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	71	1
16.	Dinas Pangan	32	2
17.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	102	8
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	33	2
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31	1
20.	Dinas Pendidikan	1.719	1.101
21.	Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	36	-
22.	Dinas Perhubungan	95	-
23.	Dinas Perikanan	40	3
24.	Dinas Perkebunan	48	1
25.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	43	1
26.	Dinas Pertanahan	21	1
27.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	32	9
28.	Dinas Sosial	28	-
29.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan	98	28
30.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	29	-
31.	Inspektorat	53	2
32.	Kecamatan Batu Putih	15	-
33.	Kecamatan Biatan	14	-
34.	Kecamatan Biduk-Biduk	21	-
35.	Kecamatan Gunung Tabur	36	-
36.	Kecamatan Kelay	13	-
37.	Kecamatan Maratua	21	-
38.	Kecamatan Pulau Derawan	15	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH WAJIB LHKAN	
		PNS	PPPK
39.	Kecamatan Sambaliung	35	-
40.	Kecamatan Segah	18	-
41.	Kecamatan Tabalar	18	-
42.	Kecamatan Talisayan	24	-
43.	Kecamatan Tanjung Redeb	68	-
44.	Kecamatan Teluk Bayur	42	-
45.	RSUD Dr.ABDUL RIVAI	487	104
46.	Satuan Polisi Pamong Praja	50	-
JUMLAH		4.716	1.708

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIAT DAERAH
03
MUHAMMAD SAID

